

Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Kajian

Mohammad Orinaldi

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence email: orinaldi@uinjambi.ac.id

Abstract. This study aims to review various policies taken by the government when the government considers priorities balance between handling Covid-19, namely by implementing restrictions on community activities and the country's economic conditions. This research is a type of qualitative research with descriptive method. Descriptive method was chosen because the research was conducted with current events related to current conditions. The results of this study indicate that Indonesia has not implemented significant policies while still implementing normal human inflows from abroad. Either, a new policy's the end of PSBB and changes to the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) which was launched by the Chair of KPCPEN on January 7, 2021 with the first locus in Java and Bali. Observing the economic crisis history that hit Indonesia, many parties will be grateful, considering that the impact of the Covid-19 pandemic on the economy was no more severe than the monetary crisis in 1998. Currently, the government has adopted six strategies for Indonesia's economic transformation: (1) Competitive Human Resources; (2) Economic Sector Productivity includes Industrialization, (3) Green Economy includes a low carbon economy, blue economy, and energy transition aimed at meeting increasing energy needs, opening up more sustainable green job opportunities, and supporting the reduction of greenhouse gas emissions; (4) Digital Transformation; (5) Domestic economic integration; and (6) Relocating the National Capital as a new source of growth and balancing the economy between regions.

Keywords: Covid-19; Indonesian Economy; PPKM

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menghancurkan sendi-sendi perekonomian dunia pada tahun 2020, dan tampaknya masih akan tinggi pada tahun 2021. Worldometer, per 22 April 2021 merilis data kasus harian positif Covid-19 mencapai lebih dari 892 ribu orang, jumlah kumulatif tidak kurang dari 145 juta orang di seluruh dunia terinfeksi, dan lebih dari 3 juta di antaranya meninggal. Pandemi ini telah menjadi ancaman signifikan bagi kesehatan fisik dan mental manusia dan secara dramatis mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan implikasi psikososial dalam skala global. Dampak pandemi SARS-CoV-2 pada kesehatan masyarakat benar-benar di luar imajinasi semua orang. Pandemi telah melanda lebih dari 210 negara, dan sebagian besar negara ini masih berada di bawah berbagai tindakan pengendalian infeksi, termasuk penguncian, karantina, penggunaan masker wajib, dan jarak publik (Wang C. dkk, 2021).

Pandemi Covid-19 telah membawa dunia ke jurang resesi ekonomi terburuk dalam 50 tahun terakhir sejarah ekonomi dunia. Pada 2020 ekonomi dunia akan tumbuh minus 3,5 persen, seperti dikutip Dana Moneter Internasional (IMF) melalui publikasinya "*The World Economic Outlook*" (2021), dimana angka ini lebih buruk dari krisis keuangan global 2009 dan Asia. Krisis moneter tahun 1998. Sementara itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang terus berjuang melawan Covid-19 dengan berbagai kebijakan yang menggabungkan penanggulangan tanpa mengorbankan perekonomian. Sebagaimana data Pemerintah Indonesia melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), per 22 April 2021, jumlah kasus harian bertambah menjadi 6.243 orang, secara kumulatif jumlah kasus positif mencapai lebih dari 1,6 juta, dan lebih dari 44 ribu di antaranya meninggal. Perekonomian Indonesia sendiri di tahun 2020 tidak kalah suramnya dengan apa yang terjadi di dunia. Setelah ekonomi tumbuh positif pada triwulan I-2020 sebesar 3 persen, pertumbuhan ekonomi turun terjun bebas dalam 3 triwulan berikutnya berturut-turut minus 5,3 persen, minus 3,5 persen, dan minus 2,2 persen. Secara kumulatif pada 2020, Indonesia akan tumbuh minus 2,1 persen (BPS, 2021). Sesuatu yang sangat disyukuri, mengingat pada tahun 1998, perekonomian Indonesia turun minus 13,3 persen. Dari sisi keuangan negara, kondisi ini juga membuat peta APBN berubah total. Pada Juni 2020, melalui Menkeu Sri Mulyani (Putri, 2021), pemerintah memotong anggaran Kementerian dan Lembaga kemudian melakukan realokasi sekitar Rp695,2 triliun untuk penanganan Covid-19 (Akbar, 2021). Kemudian, audit BPK pada akhir tahun 2020 merilis angka bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp 1.035 triliun untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut berasal dari APBN sebesar Rp 937,42 triliun, dan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 86,36 triliun. Kemudian dari sektor moneter Rp. 6,50 triliun. Menurut rilis Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp1.226,8 triliun sepanjang 2020. Utang baru tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat atau tumbuh 180,4 persen dari realisasi pembiayaan utang pada 2019 yang hanya mencapai Rp437,5 triliun. Penarikan utang baru tersebut juga jauh lebih tinggi dari target APBN 2020 sebesar Rp351,9 triliun. Namun, masih dalam kisaran yang diproyeksikan dalam Perpres 72/2020, yaitu Rp1.220,5 triliun

(Velarosdela, 2020).

Konsekuensi dari situasi ini memaksa pemerintah untuk merevisi semua target pembangunan pada tahun 2020 dan memotong APBN tahun 2020 secara signifikan untuk direlokasi ke penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah terpaksa merevisi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 untuk dialihkan dan direncanakan untuk mendorong pencapaianya. pada tahun 2021 dan sesudahnya. Artikel ini akan mengupas beberapa hal terkait bagaimana perkembangan Indonesia di tahun 2020 saat Covid-19 melanda. Tujuan penelitian untuk mengulas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah ketika pemerintah mempertimbangkan keseimbangan prioritas antara penanganan Covid-19 yakni dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dan kondisi ekonomi negara. Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menangani Covid-19 yang relatif moderat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kemudian agresif melalui program vaksinasi yang sangat longgar melalui deklarasi *new normal*. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai program prioritas nasional dalam RKP 2021, di mana pencegahan Covid-19 diprioritaskan dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah, pemerintah akan melanjutkan program-program yang tertunda di tahun pertama RPJMN 2020-2024 dan mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan yang berdampak pada perekonomian negara. Sehingga, peneliti tertarik membahas mengenai, "Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi."

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian dilakukan dengan peristiwa-peristiwa yang tengah hangat berlangsung terkait kondisi saat ini. Nazir (2011) mengungkapkan bahwa metode deskriptif dilakukan untuk meneliti status kelompok, seseorang, subjek, serangkaian kondisi, sistem berpikir, atau acara dari semua kelas saat ini. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah menjelaskan atau menggambarkan hubungan antara fenomena yang sistematis dan yang diselidiki. Sehingga, fenomena kelompok sosial tersebut dapat terungkap secara jelas dan akurat.

Hasil

Kondisi Selama Pandemi Covid-19

Panji Hadisoemarto dalam Velarosdela (2020), saat Covid-19 kembali hangat merebak ke seluruh dunia, pernah menyatakan bahwa masyarakat dunia akan hidup dengan Covid, atau secara lugas hidup di bawah ancaman Covid-19 setiap saat (Muhyiddin, 2020). Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia sangat rentan terhadap pandemi Covid-19 (Barbier dkk, 2020). Hal ini antara lain karena adanya dukungan internasional dalam setiap permasalahan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Saat Covid-19 melanda, negara-negara disibukkan dengan urusan dalam negerinya masing-masing, mengingat pandemi ini juga sangat sulit untuk dibendung. Negara besar seperti Amerika Serikat juga sangat kewalahan, sehingga kasus positif dan kematian akibat terinfeksi Covid-19 termasuk yang tertinggi di dunia. Sekitar 13 bulan setelah ditemukannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia, kurva kasus infeksi meski fluktuatif namun terus meningkat. Sebagaimana disampaikan dalam pengantar penelitian ini, kasus Covid-19 terus berkembang seiring dengan kebijakan yang tidak sinkron antara penanggulangan Covid-19, penyelamatan ekonomi, dan kebijakan yang akan berdampak besar pada agenda politik mobilitas penduduk yang melanda. banyak dasar. Protokol kesehatan yang harus dipatuhi semua pihak.

Peningkatan drastis kasus harian pertama terjadi setelah Idul Fitri, sekitar pertengahan Mei 2020, di mana kasus harian di bawah 300 kasus langsung berlipat ganda menjadi sekitar 600 kasus (Velarosdela, 2020). Kemudian pada pertengahan Juni 2020, ada sekitar 1.000 kasus harian. Akumulasi ini akibat adanya hari raya (bersamaan dengan kontroversi mudik dan pulang kampung) serta dicanangkannya era normal baru oleh pemerintah (Candra, 2020). Sparrow, Dartanto, dan Hartwig (2020) mencatat bahwa Indonesia kurang tanggap di awal-awal Covid-19. Sementara banyak negara di Asia dan Eropa Barat telah memperketat arus keluar masuk orang untuk mencegah Covid-19, Indonesia belum menerapkan kebijakan yang signifikan dengan tetap memberlakukan arus masuk manusia normal dari luar negeri. Berbeda dengan Singapura, misalnya, ketika mengidentifikasi penyebaran virus, ia merespons dengan melakukan penyaringan ketat terhadap pelancong yang masuk, pembatasan perjalanan, dan pelacakan kontak yang kaku. Meskipun langkah-langkah ini pada awalnya efektif, pada bulan April, infeksi mulai meningkat, mendorong Singapura untuk melakukan penguncian, menutup sekolah, universitas, dan tempat kerja untuk mengurangi jumlah kasus harian. Thailand, Vietnam, dan Malaysia juga telah memberlakukan *lockdown* dan berhasil meratakan kurva Covid-19 dan meminimalkan infeksi baru. Namun, angka kasus harian terus meningkat dari Juni 2020 hingga awal Februari 2021 dengan berbagai akumulasi alasan. Antara lain, klaster pasca mudik lebaran (Yuniar, 2020), pelonggaran PSBB, proklamasi *new normal*, dan klimaks masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga pilkada serentak Desember 2020. Kebijakan PSBB terlihat seperti kebijakan yang hanya di atas kertas, tetapi tidak

dilaksanakan. Kasus harian terus meningkat hingga akhir Januari 2021, dengan kasus harian mencapai 14.000 orang positif Covid-19.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sebelum penerapan PPKM, pemerintah sebelumnya telah menegakkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bappenas (2021) menerbitkan buku berjudul Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19. Evaluasi pelaksanaan PSBB mulai dari sisi regulasi hingga penegakannya. Pelaksanaan PSBB diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Ketentuan PSBB tersebut mensyaratkan adanya persyaratan seperti jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat secara signifikan dan menyebar dengan cepat ke beberapa wilayah serta memiliki keterkaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9/2020 tentang Pedoman PSBB per 3 April 2020 mengatur lebih lanjut penjabaran PP tersebut, yang meliputi: 1) libur sekolah dan tempat kerja; 2) pembatasan kegiatan keagamaan; 3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; 4) pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) pembatasan moda transportasi; dan 6) pembatasan kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan. Permenkes tersebut mengutip standar dan kriteria WHO dalam menguraikan pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dalam hal pelaksanaan kebijakan PSBB, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan PSBB untuk wilayahnya kepada Menteri Kesehatan.

PSBB pertama yang disetujui Menteri Kesehatan adalah di DKI Jakarta yang dimulai pada 10 April 2020. Pemberlakuan PSBB awalnya hanya 14 hari, tetapi kemudian diperpanjang beberapa kali hingga Gubernur DKI Jakarta mengumumkan transisi atau pelonggaran. PSBB pada 5 Juni 2020. Kebijakan PSBB di DKI Jakarta kemudian diikuti Jawa Barat sejak 15 April 2020, Banten pada 18 April 2020, dan 6 provinsi lainnya. Dari 18 daerah yang awalnya menerapkan PSBB (dua provinsi: DKI Jakarta dan Sumatera Barat, serta 16 kabupaten/kota), hingga 10 September 2020, hanya 7 daerah yang masih menerapkan PSBB. Pengamatan dilakukan oleh Parady dkk (2021) tentang pelaksanaan PSBB, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. PSBB merupakan intervensi yang efektif untuk memperlambat mobilitas masyarakat, yang secara langsung mempengaruhi angka reproduksi (R) Covid-19. PSBB juga dinilai lebih mampu membatasi pergerakan masyarakat dibandingkan larangan mudik ke pemerintah pusat pada 21 April 2020 atau kebijakan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan. ditetapkan pada 31 Maret 2020. Namun, pemberlakuan PSBB tersebut dinilai tidak efektif. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya mobilitas sejumlah tenaga kerja, atau mobilitas antar lokasi, dan provinsi di Jawa maupun luar Jawa. Hingga awal Oktober 2020, memasuki pekan ke-41 pandemi, angka kepositifan kawasan Indonesia masih tergolong tinggi, yakni 13,6% atau 2,7 kali lipat dari target WHO. Selain itu, meskipun angka kematian kumulatif tampaknya telah menurun, hingga minggu ke 41 masih relatif tinggi (3,5%) (Kemenkes, 2020). Analisis tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menunjukkan bahwa dari April hingga September 2020, di wilayah Indonesia, penurunan proporsi penduduk yang tinggal di rumah diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk. perkiraan kasus baru (*onset*) per hari. Ketika proporsi penduduk di rumah saja di atas 40%, tidak ada peningkatan kasus per hari, bahkan cenderung menurun, yaitu sekitar 500 kasus atau onset per hari. Namun bila proporsi penduduk di rumah saja kurang dari 40%, maka setiap penurunan 1% penduduk di rumah saja akan meningkatkan perkiraan kasus menjadi 500 kasus (Aliansyah, 2020). Oleh karena itu, proporsi orang yang tinggal di rumah harus lebih dari 55%. Untuk itu, direkomendasikan agar pembatasan sosial diperketat agar penerapan PSBB berhasil menekan laju penyebaran Covid-19. Dari seluruh daerah, selain DKI Jakarta yang telah menerapkan PSBB, belum ada yang berhasil menekan laju penyebaran atau penularan Covid-19.

Pada periode Juni hingga September 2020, kasus positif Covid-19 di Indonesia meningkat pesat, dengan tambahan 50.000 kasus baru dalam waktu kurang dari sebulan (Velarosdela, 2020). Akibatnya, PSBB kedua harus diberlakukan kembali di DKI Jakarta mulai 14 September 2020 hingga 11 Oktober 2020 sesuai dengan Peraturan DKI Jakarta Nomor 959/2020 tentang Pemberlakuan Pemberlakuan PSBB Dalam Penanganan Covid-19. PSBB dilaksanakan karena laju pertumbuhan kasus baru yang cepat, ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit yang semakin menyusut, kurangnya sumber daya manusia untuk pengobatan, dan hasil angka positif yang lebih tinggi dari angka yang ditetapkan WHO. Lima faktor yang diatur dalam kebijakan PSBB kedua untuk DKI Jakarta adalah: 1) Keterbatasan kegiatan sosial, ekonomi, agama, budaya, pendidikan dan lainnya; 2) Kontrol mobilitas; 3) Rencana isolasi terkendali; 4) Pemenuhan kebutuhan dasar; dan 5) Penegakan sanksi. Setelah lebih dari sebulan menerapkan sanksi peraturan progresif, tidak ada dampak yang terlihat terhadap kepatuhan warga DKI Jakarta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tingkat kepatuhan warga dalam menggunakan masker masih di bawah standar minimal, sebagaimana diungkapkan kajian FKM UI yang menunjukkan penggunaan masker bagi warga di DKI Jakarta masih sekitar 70 persen. Sebagai perbandingan, standar minimum adalah 85 persen. Penerapan kebijakan PSBB belum efektif mendorong perilaku yang diinginkan dari masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pelaksanaan PSBB. Hal ini diperparah dengan tidak adanya akibat hukum yang jelas bagi pelaku, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tidak tersedianya alternatif kegiatan yang dapat dilakukan (LIPI, 2020).

Pergantian Menteri Kesehatan pada akhir tahun 2020 juga membawa perubahan terhadap kebijakan penanganan Covid-19, serta berfungsinya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang diketuai oleh Menko Perekonomian yang dibentuk pada Juni 2020. Salah satu kebijakan baru tersebut adalah berakhirnya PSBB dan perubahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dicanangkan oleh Ketua KPCPEN pada 7 Januari 2021 dengan lokus pelaksanaan tahap pertama di Jawa dan Bali (Nurdiana, 2021). Pemerintah mulai membatasi aktivitas masyarakat akibat tingginya kasus corona pada 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali. Seperti PSBB, PPKM juga dievaluasi setiap 2 minggu dan diperpanjang 2 minggu. Pemerintah terus memperpanjang masa berlaku PPKM hingga April 2021 (Humas Setkab, 2021). Pemerintah menyatakan PPKM cukup berhasil menahan laju penambahan kasus Covid-19. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala KPCPEN per 18 Maret lalu, angka kasus aktif di Indonesia sebesar 9,12 persen, lebih baik dari rata-rata dunia sebesar 17,23 persen. Angka kesembuhan 88,16 persen juga lebih baik dari angka kesembuhan global 80,56 persen. Sementara itu, angka kematian mencapai 2,71 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata dunia sebesar 2,21 persen. Kebijakan PSBB dan PPKM sudah berjalan kurang lebih satu tahun dan berbagai kendala muncul di sana-sini. Mengingat Indonesia tidak pernah memberlakukan kebijakan *lockdown*, otomatis keberhasilan penanganan Covid-19 sangat bergantung pada kebijakan PPKM tersebut.

Perekonomian Indonesia 2020

Mencermati sejarah krisis ekonomi yang melanda Indonesia, banyak pihak akan bersyukur, mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian tidak lebih parah dari krisis moneter tahun 1998. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020, yang berada di bawah tekanan luar biasa akibat pandemi Covid-19, tumbuh minus 2,1 persen. Ini adalah pertama kalinya sejak krisis ekonomi Asia pada 1997-1998. Bandingkan dengan tahun 1998 dimana pertumbuhan ekonomi mencapai minus 13,3 persen (gambar 5). Namun, pertumbuhan negatif ini dapat membawa Indonesia masuk ke dalam kategori *Lower Middle Income Countries*, setelah sempat masuk kategori *Upper Middle Income Countries* pada tahun 2019. Selain itu, target Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi berpotensi untuk dicapai lebih lama. Hal ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari skenario dalam visi Indonesia 2045 (Bappenas, 2021). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,2 persen. Meski masih terkontraksi, realisasi ini terus membaik dibandingkan triwulan II dan III 2020 yang masing-masing terkontraksi 5,3 dan 3,5 persen. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia juga relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada di jalur yang benar menuju pemulihan. Namun, masih diperlukan upaya lebih untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,0 persen.

Sektor UKM (Usaha Kecil Menengah), Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Selama pandemi Covid-19, survei yang dilakukan BPS (2020) menunjukkan lebih dari 80 persen perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Penurunan pendapatan dunia usaha sangat terasa, baik kecil maupun besar, di berbagai sektor. Namun, UKM dan perusahaan dengan nilai tambah rendah merasakan dampak yang paling signifikan. Penurunan pendapatan UKM turun lebih dari 50 persen, dibandingkan perusahaan besar yang turun sekitar 29 persen (= Buana, dkk., 2021). Pembatasan sosial yang diberlakukan menyebabkan lebih dari 60 persen perusahaan menghentikan usahanya selama pandemi. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia (Doarest, dkk, 2020), per Juni 2020, 40 persen perusahaan telah berhenti sementara, sekitar 20 persen masih tutup pada saat survei, dan 2-3 persen menghentikan bisnis mereka secara permanen. Survei yang sama menunjukkan 9 persen perusahaan menyatakan bangkrut.

Penghentian usaha dan penurunan pendapatan mengakibatkan kapasitas produksi di bawah 70 persen. Sekitar 13 persen pelaku usaha dalam survei Bank Dunia mengurangi jumlah pekerja, baik dengan mengurangi jam kerja, maupun merumahkan pekerja. Sementara itu, penurunan kinerja industri manufaktur sangat dipengaruhi oleh terhentinya pasokan bahan baku impor akibat terhentinya aktivitas perdagangan luar negeri di negara asal. Kondisi ini mengakibatkan beberapa perusahaan tidak dapat melakukan produksi. Industri yang masih dapat menyediakan bahan baku dan bahan penolong substitusi baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari sumber impor lainnya masih menghadapi kendala berupa kenaikan harga. Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia, dimana jalur distribusi/logistik terganggu karena keterbatasan mobilitas. Dampak yang dirasakan berupa biaya tambahan yang menurunkan tingkat keuntungan perusahaan dan menjadi beban konsumen akhir. Penurunan produksi juga berarti bahwa beberapa orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Kondisi ini, ditambah dengan pembatasan mobilitas selama PPKM, menyebabkan penurunan pendapatan dan minat belanja masyarakat. Akibatnya, lahirlah lingkar setan, di mana melemahnya konsumsi/permintaan kemudian memaksa industri untuk mengurangi aktivitasnya. Utilisasi kapasitas produksi pada masa pandemi berada pada level kurang dari 50 persen, atau jauh turun dari periode normal yang mencapai 80-90 persen. Penjualan yang lebih rendah dan biaya produksi yang lebih tinggi selanjutnya menurunkan kualitas kondisi keuangan pelaku industri pengolahan nonmigas, dengan dampak paling signifikan

terhadap kualitas arus kas perusahaan. Sebagian besar perusahaan industri besar dan menengah di subsektor industri pengolahan nonmigas padat karya menyatakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk membayar biaya tetap reguler seperti pembayaran iuran BPJS Kesehatan, biaya tunjangan karyawan dan biaya minimum listrik ke PLN. Banyak perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi di perusahaan pengolahan nonmigas dengan karakteristik penggunaan energi yang tinggi (*energy-intensive*) karena tingginya biaya tetap. Dampaknya adalah pada volume produksi yang jauh berkurang dan pengurangan jam kerja karyawan, pemutusan hubungan kerja sementara, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Sejak pandemi Covid-19, aktivitas pariwisata dunia mengalami penurunan yang signifikan. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Januari-September 2020 hanya mencapai 3,56 juta orang atau turun 70 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan kunjungan wisman yang signifikan terjadi seiring dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, kebijakan pemerintah untuk mengurangi cuti bersama pada hari besar keagamaan, pembatasan perjalanan, dan persepsi masyarakat umum tentang bahaya pandemi. Kondisi ini terlihat dari perkembangan penumpang di berbagai moda transportasi utama. Total aktivitas perjalanan domestik moda pesawat, kereta api dan kapal laut selama Januari-September 2020 mengalami penurunan sebesar 53,8 persen. Jumlah penumpang pesawat domestik hanya 23,5 juta orang atau turun 58 persen pada periode Januari-September 2020. Jumlah penumpang kereta api dan penumpang kapal pada periode yang sama juga turun signifikan, masing-masing sebesar -53,8 persen dan -39,5 persen. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyatakan bahwa 1.642 hotel dan 353 restoran telah ditutup akibat pandemi dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara keseluruhan, sekitar 2,6 juta pekerja formal dan informal di sektor pariwisata diperkirakan terkena dampak Pandemi yang terdiri dari 1 juta pengangguran penuh/pindah ke sektor lain, 1,2 juta mengalami pengurangan jam kerja/underpaid/underemployed, dan 0,4 juta pariwisata formal. pekerja telah beralih ke pekerja pariwisata informal. Kajian yang dilakukan Kementerian Ekonomi Kreatif pada April-Mei 2020 terhadap pelaku usaha di 17 subsektor ekonomi kreatif juga menunjukkan dampak signifikan pandemi Covid-19 bagi pelaku ekonomi kreatif. Dampak tersebut tampak antara lain: (i) sekitar 90 persen pelaku usaha kreatif mengalami pembatalan kegiatan yang berkaitan dengan kesibukan seperti syuting, *talk show*, konser dan sebagainya; (ii) sekitar 70 persen pelaku usaha mengalami penangguhan aktivitas kerja yang sedang berjalan seperti penelitian dan survei lapangan; (iii) sekitar 65 persen pelaku usaha mengalami penghentian kegiatan di tempat kerja seperti pelatihan atau lokakarya; dan (iv) 50 persen pelaku usaha mengalami pembatalan pertemuan dengan klien. Kondisi ini memerlukan penanganan untuk menjaga ketahanan usaha kreatif di masa pandemi Covid-19 dan meningkatkan kesiapan pelaku usaha kreatif untuk aktif kembali pada masa pemulihan.

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi memperkirakan pendapatan yang hilang akibat pemutusan hubungan kerja pada Maret - Juli 2020 cukup beragam, dari Rp 6 juta hingga 60 juta dengan kelompok terbanyak di kisaran Rp 15 juta. Terlepas dari potensi dampak positif digitalisasi, hanya sekitar 18 persen bisnis kreatif yang beralih ke *platform online*, terutama di subsektor periklanan dan *game*. Pada saat yang sama, sisanya harus dibatalkan/ditangguhkan. Dalam rantai nilai perusahaan kreatif, Covid-19 menyebabkan penurunan permintaan dan kapasitas produksi. Subsektor yang membutuhkan interaksi fisik paling banyak mengalami penurunan permintaan dan produksi. Gangguan permintaan dan produksi juga membuat bisnis kreatif sulit mengakses pendanaan. Kabar baiknya, kebijakan Pemerintah terkait pembatasan sosial membuka peluang bagi subsektor ekonomi kreatif yaitu meningkatnya konsumsi konten *over-the-top* (OTT) pada subsektor film dan *video on demand* (*streaming* film), musik, televisi, dan *game*. Selama periode awal pandemi Covid-19 pada Maret 2020, penggunaan aplikasi video *streaming* bagi masyarakat Indonesia meningkat sebesar 15 persen dan diprediksi akan terus meningkat. Selain itu, terjadi peningkatan pengunduhan aplikasi belanja online sebesar 10 persen hingga akhir periode Maret 2020. Namun, di sisi lain, industri film juga mencatatkan kerugian pendapatan sekitar Rp. 3 triliun ketika jumlah pelanggan saluran OTT domestik terus meningkat menggunakan penyedia asing, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan 15,8 juta pelanggan baru Netflix di seluruh dunia.

Dampak terhadap Keuangan Pemerintah

Untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengambil langkah cepat, termasuk upaya pemulihan perekonomian nasional. Percepatan penanganan pandemi Covid-19 dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah berwenang melonggarkan kebijakan defisit anggaran di atas tiga persen paling lambat hingga akhir tahun anggaran 2022. Beberapa langkah kebijakan yang diambil Pemerintah antara lain refocusing dan realokasi anggaran untuk kegiatan non prioritas serta pemberian stimulus untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai stimulus tersebut diberikan melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, dan pembiayaan anggaran untuk mengatasi masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah. Alokasi yang diberikan Pemerintah untuk program PEN mencapai Rp695,2 triliun atau setara dengan 4,2 persen dari PDB.

Namun, di sisi lain, sebagai akibat dari penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, penerimaan negara diperkirakan akan mengalami penurunan tajam pada 2020. Jika dibandingkan dengan 2019, penerimaan negara dan hibah diperkirakan turun hingga lebih dari Rp250 triliun. Selain penurunan kegiatan ekonomi, penurunan pendapatan negara juga disebabkan oleh hilangnya potensi pendapatan karena adanya insentif berupa relaksasi pajak. Akibat penurunan pendapatan negara, sementara alokasi belanja meningkat, defisit anggaran diperkirakan mencapai 6,3 persen dari PDB. Sejalan dengan meningkatnya defisit, pembiayaan APBN diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun yang sebagian akan dibayarkan melalui penerbitan surat utang. Stok utang diperkirakan akan meningkat hingga mendekati 40 persen dari PDB pada tahun 2020. Pemerintah bersama dengan BI telah sepakat untuk menerapkan mekanisme pembagian beban untuk mengurangi beban fiskal di masa depan. Dampak Terhadap Sektor Keuangan - Perbankan Belajar dari krisis sebelumnya, baik di Indonesia maupun di negara lain, krisis ekonomi akan semakin parah ketika sektor keuangan terkena dampaknya. Oleh karena itu, mencegah krisis menyebar ke sektor keuangan/perbankan adalah kunci untuk menahan resesi ekonomi yang lebih dalam. Hingga triwulan III 2020, langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas keuangan untuk membantu sektor keuangan, salah satunya restrukturisasi utang, dapat menjaga sektor keuangan, termasuk perbankan, dalam kondisi yang relatif aman. Kondisi perbankan saat ini relatif baik, terindikasi dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang masih di atas 20 persen, dan Non Performing Loan (NPL), di bawah 5 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) terus tumbuh positif, sementara pertumbuhan kredit melambat, mengindikasikan likuiditas perbankan yang melimpah.

Perencanaan Pembangunan dalam RKP 2021

Pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencanangkan RKP 2021 sebagai tonggak percepatan pembangunan yang terganggu akibat pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020, tahun pertama periode RPJMN 2020-2024. RKP 2021 mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan enam fokus pembangunan, yaitu: (i) pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi; (ii) penguatan sistem ketahanan pangan; (iii) reformasi sistem kesehatan nasional; (iv) reformasi sistem perlindungan sosial; (v) reformasi sistem ketahanan bencana; dan (vi) penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. RKP 2021 oleh pemerintah ini juga ditargetkan menjadi momentum untuk mendorong reformasi sosial, baik dalam aspek perubahan struktural maupun perubahan budaya, pola pikir, dan paradigma. Salah satu tujuan pembangunan tahun 2021 adalah juga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.²⁶ Sementara itu, target pembangunan nasional tahun 2021 ditetapkan untuk mencakup dua komponen utama. Pertama, pemulihan ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi 5,0 persen, tingkat pengangguran terbuka 7,7-9,1 persen, rasio Gini 0,377-0,379, dan penurunan emisi gas rumah kaca 29,85% menjadi 30,64 persen pada 2030. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menjaga daya beli masyarakat dengan target Indeks Pembangunan Manusia 72,78–72,95 dan angka kemiskinan 9,2–9,7 persen.

Upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak perekonomian yaitu industri, pariwisata, dan investasi melalui pembentahan di berbagai aspek. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,5-5,5 atau titik tengah 5 persen dengan pemulihan bentuk-V. Pertumbuhan ekonomi ini membutuhkan Rp 5.800-5.900 triliun, dengan kontribusi terbesar adalah sektor swasta. Dengan demikian, sektor swasta memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Investasi dalam negeri akan terus meningkat, dan sektor pariwisata diperkirakan akan pulih secara bertahap. Sebaliknya, sektor industri ditargetkan pulih dan tumbuh lima persen sehingga tenaga kerja yang terserap sebanyak 18,4 juta orang. Perhitungan Bappenas menunjukkan bahwa akibat pandemi Covid-19, hilangnya daya beli masyarakat disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebesar Rp 374,4 triliun, dimana kerugian ini 14 diakibatkan dari penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan tingkat pemanfaatan industri turun 55,3 persen dari titik sebelumnya, yakni 76,3 persen. Untuk mempercepat perekonomian Indonesia, terutama untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, diperlukan transformasi ekonomi, karena tidak mungkin mengembalikan produk domestik bruto ke angka sebelum krisis. Kunci transformasi ekonomi adalah mengubah struktur perekonomian dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi. Terkait kebutuhan investasi, pada 2021, dengan target pertumbuhan ekonomi lima persen, dibutuhkan investasi Rp 5.800-5.900 triliun. Pemulihan ekonomi juga akan ditopang oleh pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan stok infrastruktur yang baru mencapai 43 persen dari PDB.

Salah satu isu yang dibahas adalah transportasi yang menyebabkan biaya logistik Indonesia menjadi sangat tinggi dan kurang kompetitif sehingga menimbulkan efek domino yang buruk di semua sektor, termasuk kualitas kesehatan dan transformasi ekonomi nasional. Pengembangan pelabuhan terpadu dan jaringan bandara terpadu yang akan menjadi penghubung pembangunan juga menjadi salah satu prioritas. Pembangunan infrastruktur yang mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi, termasuk transformasi digital, sangat penting dalam mendorong perekonomian, terutama kegiatan perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. RKP 2021 juga dinyatakan sebagai salah satu langkah dalam melakukan transformasi ekonomi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sebelum tahun 2045. Untuk itu, pemerintah telah mengadopsi enam strategi transformasi ekonomi Indonesia. Strategi

Pertama: Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, yang meliputi sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta penelitian dan inovasi. Strategi Kedua: Produktivitas Sektor Ekonomi meliputi Industrialisasi, Produktivitas UMKM, dan Modernisasi Pertanian. Strategi Ketiga: Ekonomi Hijau mencakup ekonomi rendah karbon, ekonomi biru, dan transisi energi yang ditujukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi, membuka peluang kerja hijau yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Strategi Keempat: Transformasi Digital terdiri dari, infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler. Strategi kelima: integrasi ekonomi domestik mencakup pusat kekuatan ekonomi yang berfokus pada infrastruktur konektivitas: superhub, hub laut, hub udara, dan rantai nilai domestik. Strategi Keenam: Merelokasi Ibukota Negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan menyeimbangkan perekonomian antar daerah. Untuk sektor pertanian yang tumbuh positif pada tahun 2020, akan diterapkan strategi pengembangan sistem pangan nasional, dari hulu hingga hilir. Hilirisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketahanan energi pada tahun 2021 ditargetkan tetap berjalan baik dalam ketersediaan, bauran, dan akses energi. Tiga dimensi fokus pada ketahanan energi, yaitu ketahanan energi, yaitu bagaimana negara menyediakan energi saat ini dan di masa depan, kemudian pemerataan penyediaan energi, hingga kelestarian lingkungan terkait transisi menuju energi yang terjamin dan bebas emisi. Di bidang sosial, pengurangan pengangguran melalui pemulihian ekonomi dilakukan seiring dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja dan peningkatan investasi. Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan tambahan dari skema jaminan sosial, yang erat kaitannya dengan kemampuan memberikan pelatihan dan pekerjaan. Pemerintah juga memastikan layanan penjemputan di layanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mendaftarkan penduduk dan memperkuat sistem jaminan sosial yang terintegrasi, termasuk memastikan kelas rawat inap dan jaminan kerja. Transformasi ekonomi juga dapat ditempuh melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Meski pandemi Covid-19 berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi, namun pencapaian SDGs Indonesia patut diapresiasi mengingat Indonesia merupakan salah satu dari enam negara dengan formulasi *Voluntary National Review* terbaik. Indonesia juga berhasil mencatatkan *Goal 16 Report* yang terdiri dari perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut Indonesia belum menerapkan kebijakan yang signifikan dengan tetap memberlakukan arus masuk manusia normal dari luar negeri. Salah satu kebijakan baru tersebut adalah berakhirnya PSBB dan perubahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dicanangkan oleh Ketua KPCPEN pada 7 Januari 2021 dengan lokus pelaksanaan tahap pertama di Jawa dan Bali. Mencermati sejarah krisis ekonomi yang melanda Indonesia, banyak pihak akan bersyukur, mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian tidak lebih parah dari krisis moneter tahun 1998. Saat ini, pemerintah telah mengadopsi enam strategi transformasi ekonomi Indonesia. Strategi Pertama: Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, yang meliputi sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta penelitian dan inovasi. Strategi Kedua: Produktivitas Sektor Ekonomi meliputi Industrialisasi, Produktivitas UMKM, dan Modernisasi Pertanian. Strategi Ketiga: Ekonomi Hijau mencakup ekonomi rendah karbon, ekonomi biru, dan transisi energi yang ditujukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi, membuka peluang kerja hijau yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Strategi Keempat: Transformasi Digital terdiri dari, infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler. Strategi kelima: integrasi ekonomi domestik mencakup pusat kekuatan ekonomi yang berfokus pada infrastruktur konektivitas: superhub, hub laut, hub udara, dan rantai nilai domestik. Strategi Keenam: Merelokasi Ibukota Negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan menyeimbangkan perekonomian antar daerah. Untuk sektor pertanian yang tumbuh positif pada tahun 2020, akan diterapkan strategi pengembangan sistem pangan nasional, dari hulu hingga hilir. Hilirisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Daftar Pustaka

- Akbar, Caesar. (2021). *Sri Mulyani: Anggaran Covid-19 Naik Jadi Rp 695,2 Triliun*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1354261/sri-mulyani-anggaran-covid-19-naik-jadi-rp-6952-triliun> pada 14 September 2021.
- Aliansyah, Muhammad Agil. (2020). *Relaksasi PSBB, Babak Baru Lawan Covid-19*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/relaksasi-psbb-babak-baru-lawan-covid-19-hot-issue.html> pada 14 September 2021.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha*. B. P. Indonesia, 5.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. Jakarta: BPS
- Bank Dunia. *Indonesia COVID-19 Observatory Brief; No. 4*. World Bank, Washington, DC. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34742> License: CC BY 3.0 IGO.
- Bappenas. (2021). *Ringkasan Pertumbuhan Ekonomi Q4 2020*. Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan

- Nasional/Bappenas.
- Barbier, E. B., & Burgess, J. C. (2020). Sustainability and development after COVID-19. *World Development*, 135, 105082.
- BPS. (2021). The World Economic Outlook.
- Buana, E. C., et al. (2021). *Bab 7: Pengelolaan Ekonomi. Buku: Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.* https://www.bappenas.go.id/files/9116/1479/0631/Buku_Studi_Pembelajaran_Penanganan_COVID-19_BAPPENAS.pdf
- Candra, Septo Andika. (2020). *New Normal, Jokowi: Kita Ingin Sehat, tapi Juga Produktif.* Diakses dari [https://republika.co.id/berita/qbwe8r396/new-normal-jokowi-kita-ingin-sehat-tapi-juga-produktif pada 14 September 2021](https://republika.co.id/berita/qbwe8r396/new-normal-jokowi-kita-ingin-sehat-tapi-juga-produktif_pada_14_September_2021).
- Doarest, Aufa; Kamphuis, Bertine. (2020). *How COVID-19 is Affecting Firms in Indonesia : Results from the 1st Round of the COVID-19 Business Pulse Survey*, June 15, 2020-June 23, 2020.
- Humas Setkab. (2021). *Pemerintah Perpanjang dan Perluas Pelaksanaan PPKM Mikro Hingga 5 April 2021.* Diakses dari <https://setkab.go.id/pemerintah-perpanjang-dan-perluas-pelaksanaan-ppkm-mikro-hingga-5-april-2021/> pada 14 September 2021
- Kemenkes, (2020). *Covid-19 dalam Angka 21 November 2020.* Diakses dari [https://www.kemkes.go.id/article/view/20112200001/covid-19-dalam-angka-per-21-november-2020.html pada 14 September 2021](https://www.kemkes.go.id/article/view/20112200001/covid-19-dalam-angka-per-21-november-2020.html)
- LIPI. (2020). *Survei Ketahanan Sosial Masyarakat Selama PSBB.* Diakses dari [http://ipsk.lipi.go.id/index.php/berita/712-survei-ketahanan-sosial-masyarakat-selama-psbb pada 14 September 2021](http://ipsk.lipi.go.id/index.php/berita/712-survei-ketahanan-sosial-masyarakat-selama-psbb)
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.
- Nazir, Moh. (2011). *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Nurdiana, Titis, (2021). *Bukan PSBB, Pemerintah Pakai Istilah Baru PPKM dalam Pembatasan Kegiatan, Ini Bedanya.* Diakses dari [https://nasional.kontan.co.id/news/bukan-psbb-pemerintah-pakai-istilah-baru-ppkm-dalam-pembatasan-kegiatan-ini-bedanya pada 14 September 2021](https://nasional.kontan.co.id/news/bukan-psbb-pemerintah-pakai-istilah-baru-ppkm-dalam-pembatasan-kegiatan-ini-bedanya)
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9/2020 tentang Pedoman PSBB
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB
- Pergub DKI Jakarta Nomor 959/2020 tentang Pemberlakuan Pemberlakuan PSBB Dalam Penanganan Covid-19
- Putri, Cantika Adinda. (2021) BPK: *Anggaran Penanganan Covid-19 RI Tembus Rp 1.000 T.* Diakses dari [https://www.cnbcindonesia.com/news/20201230095755-4-212468/bpk-anggaran-penanganan-covid-19-ri-tembus-rp-1000-t pada 14 September 2021](https://www.cnbcindonesia.com/news/20201230095755-4-212468/bpk-anggaran-penanganan-covid-19-ri-tembus-rp-1000-t_pada_14_September_2021)
- Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia under the new normal: Challenges and the way ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 269-299.
- Velarosdela, Rindi Nuris. (2020). *Ketika Angka Covid-19 Selalu Naik Pasca Libur Panjang.* Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/28/12001581/ketika-angka-covid-19-selalu-naik-pasca-libur-panjang?page=all> pada 14 September 2021
- Wang, C., Wang, Z., Wang, G., Lau, J. Y. N., Zhang, K., & Li, W. (2021). COVID-19 in early 2021: current status and looking forward. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 6(1), 1-14.
- Yuniar, Resty Woro. (2020). *Rekor kasus Covid-19 di Indonesia karena aktivitas Lebaran', kini kapasitas penumpang transportasi umum malah dinaikkan jadi 70%.* Diakses dari [https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53011687 pada 14 September 2021](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53011687)